

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi perekonomian suatu daerah mengalami proses peningkatan kearah lebih baik lagi dari keadaan sebelumnya selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi menjadi bagian penting dalam setiap daerah, dimana pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur dalam mensejahterakan masyarakat. Target dalam pertumbuhan ekonomi yang bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Negara dan Putri (2020) mengatakan keadaan perekonomian secara umum sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakat secara luas, dengan semakin baiknya kondisi perekonomian, akan sangat berpeluang besar bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dapat didefinisikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik dapat memberi bentuk perekonomian secara umum yang baik pula pada saat tertentu.

Dalam melakukan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah masih perlu pendanaan dalam membangun suatu daerah. Tidak hanya mengandalkan pendanaan pusat, pemerintah daerah perlu menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah dan berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih baik serta memberikan pemasukan daerah sebagai modal untuk membiayai pembangunan daerah.

Adanya indikator keberhasilan kinerja pemerintah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di setiap negara merupakan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi di setiap negara sangat diperhatikan, termasuk Indonesia yang saat ini menjalankan kebijakan otonomi daerah, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat diperhatikan oleh pemerintahan

setiap tahunnya. Indonesia dengan menjalankan otonomi daerahnya sendiri memberikan kesempatan untuk seluruh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota di Indonesia untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan menurut (Kesuma & Utama, 2015).

Dengan pemberlakuan otonomi daerah sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 yang direvisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 yang direvisi UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisien dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintah daerah dengan masyarakat seharusnya dapat berpartisipasi bersama dalam menggali dan mengelola potensi sumber daya yang ada dan sektor yang terus dikembangkan secara efisien, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Artinya, semakin baik kondisi perekonomian suatu daerah dalam memanfaatkan potensi sumber daya dan sektor-sektor yang ada, akan semakin memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Seperti yang ditunjukkan oleh Kesuma dan Utama (2015) menyebutkan bahwa sebaiknya otonomi di setiap daerah dapat berdiri sendiri dalam menjalankan kebijakan yang telah diambil. Dengan kata lain, tujuan dari otonomi daerah yaitu membentuk kemandirian atau mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Daerah yang telah mengetahui dengan benar potensi yang dimiliki daerahnya, maka akan dapat memanfaatkan potensi yang ada demi keberlangsungan perekonomian daerahnya. Berbeda daerah dengan yang belum

mengetahui potensi yang dimiliki daerahnya, maka pemerintah daerah belum dapat secara optimal dalam memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya.

Menurut Mamahit, A Pangemanan, dan R Ngangi (2017) mempunyai sektor-sektor unggulan yang memberikan dampak signifikan terhadap pengembangan ekonomi wilayah. Dengan pengembangan terhadap sektor-sektor unggulan ini akan menjadi pengembangan sektor-sektor lainnya yang berkaitan dalam suatu daerah tertentu. Identifikasi sektor unggulan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien. Serta kebijakan pengembangan daerah berdasarkan pada prioritas dapat menghasilkan suatu kebijakan yang lebih terarah sehingga mengurangi risiko kegagalan dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki setiap daerah. Sektor unggulan merupakan suatu struktur perekonomian yang dapat pula dipandang sebagai salah satu aspek penciri atau karakteristik dari suatu perekonomian menurut (Hajeri, Yurisinthae, & Dolorosa, 2015).

Sukarwanto dan Andriani (2019) menjelaskan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ialah nilai tambah bruto dari semua barang dan jasa yang dihasilkan wilayah domestik karna adanya akibat aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan faktor produksi yang berdomisili atau non-berdomisili. PDRB salah satu indikator dalam mengukur pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu daerah. Dengan efektivitas dan efisiensi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pembangunan, pelaksanaan pembangunan ekonomi bisa terarah pada sektor-sektor lain dan penggerak sektor seluruh perekonomian.

BPS Kabupaten Bengkalis (2019) Kabupaten Bengkalis secara astronomis terletak 207°37,2" - 0055°33,6" Lintang Utara dan 100057°57,6" - 102030°25,2" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Bengkalis memiliki batas-batas: Utara – Selat

Malaka; Selatan – Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti; Barat – Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kota Dumai; Timur – Selat Malaka dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Wilayah kabupaten ini terdiri dari pulau dan laut dengan garis pantai sepanjang lebih kurang 446 km. Kabupaten Bengkalis memiliki letak strategis karena berada pada tepi jalur pelayaran internasional, serta Kabupaten Bengkalis berada pada Kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT) dan kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT). Kabupaten Bengkalis dikategorikan daerah pantai sehingga memiliki potensi luas di bidang perikanan, serta dapat memberdayakan petani nelayan agar dapat memanfaatkan keberadaan potensi tersebut dengan maksimal di samping tetap menjaga kelestarian lingkungan pantai agar tetap terjaga serta potensi di berbagai sektor lainnya yang dapat di kembangkan.

Pada tahun 2018, Kabupaten Bengkalis terdiri dari 11 Kecamatan yang terletak di daratan dan kepulauan, yaitu: Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Talang Muandau, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil, dan Kecamatan Bandar Laksamana berada di Pulau Sumatra (daratan), Kecamatan Rupert dan Kecamatan Rupert Utara berada di Pulau Rupert, Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan berada di Pulau Bengkalis. Dan terdapat bentuk struktur perekonomian Bengkalis yang dapat dilihat dari besarnya peranan masing-masing kategori terhadap pembentukan PDRB Bengkalis.

Tabel 1. 1

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkalis Tahun 2015-2019 atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)

| Sektor PDB | Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkalis Tahun 2015-2019 atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 0,03 | 3,65 | 5,21 | 5,48 | 5,47 |
| B. Pertambangan dan Penggalian | -5,07 | -6,15 | -6,57 | -5,18 | -6,95 |
| C. Industri Pengolahan | 2,99 | 6,75 | 9,92 | 2,08 | 6,05 |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | 4,65 | 17,42 | 4,87 | 5,34 | 2,65 |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 2,86 | 1,45 | 9,51 | 0,63 | 2,32 |
| F. Konstruksi | 8,84 | 5,82 | 6,93 | 5,88 | 5,63 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1,88 | 5,22 | 6,01 | 6,01 | 5,11 |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 4,83 | 2,98 | 8,10 | 1,80 | 3,97 |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2,55 | 2,56 | 4,37 | 4,64 | 2,25 |
| J. Informasi dan Komunikasi | 8,01 | 4,95 | 5,43 | 5,55 | 8,94 |
| K. Jasa keuangan dan Asuransi | -5,51 | 8,92 | -2,18 | 2,47 | 0,20 |
| L. Real Estat | 6,57 | 1,47 | 3,32 | 4,67 | 6,30 |
| M,N. Jasa Perusahaan | 8,57 | 6,05 | 9,01 | 8,94 | 3,30 |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 3,40 | 0,17 | 0,97 | 0,98 | 3,64 |
| P. Jasa Pendidikan | 7,98 | 2,49 | 3,75 | 8,92 | 5,71 |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 10,01 | 2,24 | 5,82 | 6,45 | 6,89 |
| R,S,T,U. Jasa Lainnya | 8,79 | 8,56 | 8,41 | 9,15 | 9,49 |
| PDRB LAPANGAN USAHA | -2,74 | -2,44 | -1,72 | -1,67 | -1,86 |

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis (2020)

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018 menurun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh semakin menurunnya produksi di sebagian besar lapangan usaha. Nilai PDRB Kabupaten Bengkalis atas dasar harga konstan 2010, mencapai 76,42 triliun rupiah. Angka tersebut lebih kecil dari 77,87 triliun rupiah pada tahun 2018. Dengan demikian selama tahun 2019 terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar 1,86 persen, sedangkan selama tahun 2018 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 1,67 persen.

Pada tahun 2019, dari 17 lapangan usaha ekonomi tercatat hampir seluruh kategori lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif, hanya pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 6,95 persen. Adanya kontraksi pada kategori

ini disebabkan oleh produksi minyak bumi yang semakin menurun, sejalan dengan menurunnya tingkat produksi minyak bumi nasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis sangat dipengaruhi oleh laju pertumbuhan kategori lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, dimana lapangan usaha ini memiliki kontributor terbesar pertama dalam pembentukan nilai tambah di Kabupaten Bengkalis.

Pada kurun waktu 2015-2019 lapangan usaha dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha Jasa Lainnya dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 9,49 persen, kemudian lapangan usaha Informasi dan Komunikasi dengan rata-rata pertumbuhan 8,94 persen, dan yang ketiga lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan rata-rata pertumbuhan 6,89 persen. Ketiga kategori ini selama tahun 2019 berkontribusi dibawah satu persen terhadap perekonomian Bengkalis.

Tabel 1. 2
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkalis Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

| Sektor PDRB | Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkalis Tahun 2015-2019 atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) | | | | |
|--|--|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 7 440 747,66 | 7 712 296,91 | 8 113,97 | 8 558,42 | 9 026,26 |
| B. Pertambangan dan Penggalian | 55 844 533,39 | 52 409 818,04 | 48 890,12 | 46 359,35 | 43 139,47 |
| C. Industri Pengolahan | 11 099 978,26 | 11 849 773,19 | 13 024,99 | 13 296,38 | 14 101,08 |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | 13 887,11 | 16 306,56 | 17,10 | 18,01 | 18,49 |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 10 408,36 | 10 559,62 | 11,56 | 11,64 | 11,91 |
| F. Konstruksi | 1 925 919,37 | 2 037 913,86 | 2 179,10 | 2 307,27 | 2 437,25 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 4 003 197,26 | 4 212 214,88 | 4 465,45 | 4 733,87 | 4 975,96 |

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|------------|------------|------------|
| H. Transportasi dan Pergudangan | 204 186,61 | 210 267,05 | 227,31 | 231,41 | 240,60 |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 170 817,69 | 175 193,88 | 182,86 | 191,35 | 195,66 |
| J. Informasi dan Komunikasi | 305 156,39 | 320 250,30 | 337,63 | 356,39 | 388,24 |
| K. Jasa keuangan dan Asuransi | 215 770,85 | 235 010,10 | 229,89 | 235,57 | 236,05 |
| L. Real Estat | 225 155,78 | 228 475,26 | 236,06 | 247,10 | 262,66 |
| M,N. Jasa Perusahaan | 2 608,33 | 2 766,13 | 3,02 | 3,28 | 3,39 |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 799 409,32 | 800 801,99 | 808,56 | 816,48 | 846,22 |
| P. Jasa Pendidikan | 194 915,90 | 199 766,11 | 207,25 | 225,73 | 238,62 |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 58 434,63 | 59 743,03 | 63,22 | 67,29 | 71,93 |
| R,S,T,U. Jasa Lainnya | 161 547,39 | 175 372,06 | 191,70 | 209,24 | 229,09 |
| PDRB LAPANGAN USAHA | 82, 676 674,31 | 80, 656 528,98 | 79, 189,78 | 77, 868,78 | 76, 422,87 |

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis (2020)

Berdasarkan tabel dua, dalam harga konstan 2010, angka PDRB sedikit mengalami penurunan, dari 77,87 triliun rupiah pada tahun 2018 menjadi 76,42 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan selama tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis mengalami kontraksi sebesar 1,86 persen, dan tahun 2018 pertumbuhannya juga mengalami kontraksi sebesar 1,67 persen.

Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis masih didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bengkalis.

Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, yaitu mencapai 43,14 triliun (angka ini menurun dari 43,36 triliun di tahun 2018). Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 14,10 triliun (naik dari 13,30 triliun di tahun 2018), disusul oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 9,026 triliun (naik dari 8,55 triliun di tahun 2018). Berikutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,97 triliun (naik dari 4,73 triliun di tahun 2018) dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 2,43 triliun (naik dari 2,30 triliun di tahun 2018).

Pertumbuhan ekonomi selama 2019 masih lemah, demikian juga kondisi tahun-tahun sebelumnya. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis pada tiga tahun terakhir ini dipengaruhi oleh adanya penurunan produksi minyak bumi di Kabupaten Bengkalis, dimana kategori Pertambangan Minyak dan Gas Bumi merupakan kategori yang memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian di wilayah kabupaten bengkalis, serta peranan sektor-sektor ekonomi sebagai penyumbang dalam terbentuknya PDRB daerah mengalami fluktuasi di setiap tahunnya, dan struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap sektor-sektor ekonomi menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap sektor-sektor ekonomi yang dimiliki setiap daerah.

Dalam pandangan islam terkait sektor unggulan yang ada di setiap daerah dapat mendorong masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok semua anggota dengan jumlah komoditas yang diperlukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta pengelolaan yang baik dan efisien dalam penggunaannya, ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah shad ayat 27:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

Artinya:

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.”

Sesungguhnya kebenaran Allah SWT juga bisa ditemukan di alam semesta termasuk di balik penciptaan langit dan bumi. Bumi dan langit adalah bukti Allah SWT bersifat Wujud (ada). Keduanya mustahil ada begitu saja tanpa pencipta dan berjalan tanpa ada yang mengatur. Pada bumi dan langit ini pula manusia bisa memperoleh pelajaran atau hikmah mengenai kekuasaan Allah SWT sehingga keimanannya bertambah.

Pertumbuhan ekonomi bukan hanya membahas dalam segi peningkatan barang dan jasa, tetapi perlu adanya keterkaitan dengan moralitas dan kualitas akhlak dalam keseimbangan tujuan dunia akhirat. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi diperhatikan dari sektor unggulan yang ada di daerah serta dari segi sisi perbaikan kehidupan daerah baik agama, sosial dan kemasyarakatannya.

Penelitian ini ingin menganalisis potensi sektor unggulan-unggulan yang dapat meningkatkan perekonomian, menentukan sektor unggulan paling produktif dan ingin mengetahui pergeseran ekonomi serta menentukan strategi yang dikembangkan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, rumusan masalah yang akan disampaikan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana struktur dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Bengkalis?

2. Bagaimana cara menentukan sektor ekonomi unggulan dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Bengkalis?
3. Bagaimana strategi pengembangan ekonomi Kabupaten Bengkalis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan, tujuan masalah yang akan disampaikan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis struktur dalam peningkatan perekonomian Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk menganalisis sektor ekonomi unggulan dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Bengkalis.
3. Untuk menganalisis strategi perkembangan Kabupaten Bengkalis

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pelajaran, informasi serta edukasi bagi seluruh kalangan masyarakat agar berguna dikemudian hari. Berikut manfaat yang diharapkan oleh penulis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur atau kajian teoritis mengenai analisis sektor unggulan ekonomi terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkalis 2015-2019 serta dapat membuka kemungkinan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan yang ada.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana prasarana dan implementasi teori-teori yang diterima pada saat kuliah di lapangan.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan masukan untuk menentukan arah kebijakan pemerintah khususnya bidang ekonomi dalam pembangunan daerah di Kabupaten Bengkalis.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penggali informasi mengenai potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Bengkalis.